BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2018

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2018

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 dituangkan dalam "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus–kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju "BPOM baru".

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2018. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, November 2018
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

daftar isi

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
HIGHLIGHT **1**
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN **4**
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan .. 5
II. Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 9
III. Standardisasi 11
IV. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat 14
V. Penayangan Data dan Informasi Strategis Pada BPOM *Command Center* 19
VI. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan .. 20
VII. Layanan Bantuan Hukum (*Legal Management*) 21
VIII. Kerjasama Internasional 22
IX. Pengelolaan Anggaran 25
X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM 25
PENUTUP **26**
LAMPIRAN I **27**
LAMPIRAN II **37**

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 dituangkan dalam "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan *full spectrum* yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan telah ditemukan dan berhasil diungkap oleh BPOM dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Kasus–kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, beberapa langkah strategis dilakukan BPOM dalam rangka transformasi menuju "BPOM baru".

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2018. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, November 2018
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

daftar gambar

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 5
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2018..... 5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 6
Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 7
Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 7
Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018.. 8
Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018 8
Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping 9
Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 9
Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan III Tahun 2018 25
Gambar 12. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d Triwulan III Tahun 2018 25

BADAN POM RI

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2018

2D Barcode Upaya Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Obat dan Makanan

Jakarta / Jum'at (06/07/2018)

2D Barcode adalah representasi grafis dari data digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan. Sistem ini dicetak pada kemasan dengan tinta warna hitam dengan dasar warna putih atau warna lain dan harus mampu dibaca oleh aplikasi *Track and Trace* BPOM.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para pelaku usaha bidang obat, kosmetik, obat tradisional dan pangan sebagai pemilik data awal dan juga pemilik izin edar yang akan bersinggungan langsung dengan sistem dan aplikasi yang akan diterapkan ini. Dengan menghadiri kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami sistem 2D barcode yang akan diberlakukan.

BPOM Tegaskan Tentang SKM Melalui Konferensi Pers

Jakarta / Senin (09/07/2018)

Terkait Surat Edaran BPOM nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya, BPOM mengadakan konferensi pers untuk menegaskan hal tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang tepat bahwa SKM merupakan produk yang mengandung susu yang digunakan sebagai pelengkap sajian, bukan produk susu yang digunakan sebagai asupan pemenuhan nutrisi gizi terutama kepada bayi, apalagi pengganti ASI.

Edukasi di Area CFD, BPOM Pastikan Kesiapan Sukseskan Asian Games

Jakarta / Minggu (12/08/2018)

BPOM menggelar edukasi Obat dan Makanan aman bertema "Kerja Kita Wujudkan Obat Dan Pangan Aman Untuk Prestasi Bangsa" di area *Car Free Day* Sarinah–Thamrin. Edukasi serupa juga dilaksanakan serentak oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Kepala BPOM mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dalam memilih obat dan makanan. Di era global saat ini marak peredaran produk ilegal/palsu secara *online*. Untuk itu bagi anak muda yang gemar membeli produk online harus berhati–hati.

Selain itu, Kepala BPOM juga menyampaikan kesiapan BPOM dalam mensukseskan Asian Games 2018 melalui pengawalan keamanan pangan.

Lantik 40 Pejabat Sebagai Kepala Loka POM Kabupaten/Kota, Kepala BPOM : "Ini Momentum Perkuatan BPOM"

Jakarta / Selasa (14/08/2018)

Sesuai instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017, untuk memperkuat kelembagaan BPOM, Kepala BPOM Penny K. Lukito melantik 40 Kepala Loka POM Kabupaten/Kota yang merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Tugas dan fungsi Loka POM sendiri sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian. Loka POM merupakan perwakilan BPOM di Kabupaten/Kota, dengan demikian BPOM dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha, Bentuk Kemitraan BPOM Dalam Memerangi Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan

Jakarta / Selasa (18/09/2018)

BPOM mengadakan acara Program Penggalangan Pelaku Usaha dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait regulasi serta jenis–jenis kejahatan dan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Pelaku usaha perlu mendapat perlindungan dari BPOM, agar saat melakukan usahanya mereka mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah dengan adanya tempat mengadu dan berdiskusi terkait peraturan dalam melakukan usaha di bidang obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya kepastian hukum tersebut terjadi persaingan yang sehat.

Roadshow 5 Kota Besar: BPOM Mulai Jaring Kandidat CPNS Terbaik di Universitas Indonesia

Depok / Rabu (26/09/2018)

BPOM berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bangsa di bidang obat dan makanan. Salah satu modal strategis yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang kompeten. Dalam rangka penerimaan CPNS tahun 2018, BPOM mengadakan *roadshow Job Fair* yang diselenggarakan di 5 Kota Besar untuk mengundang putra putri terbaik bangsa dan memberikan informasi ini kepada masyarakat seluas–luasnya. *Job Fair* diawali di Universitas Indonesia dengan dibuka langsung oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito.

BADAN POM RI

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2018

I Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

Sebelum obat diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus diregistrasi di BPOM untuk dievaluasi terlebih dahulu terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi pada penandaannya/label.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, telah diterbitkan **84.488** keputusan dan **81.925** persetujuan izin edar dari **99.504** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

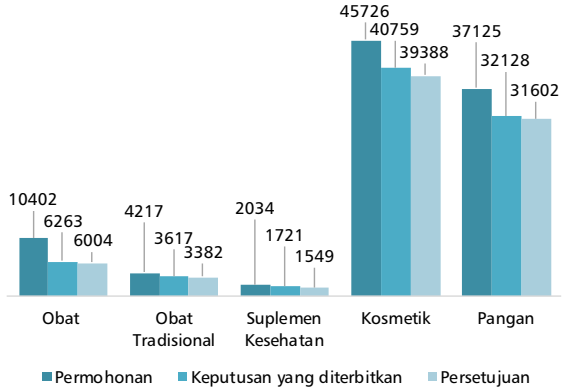

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2018

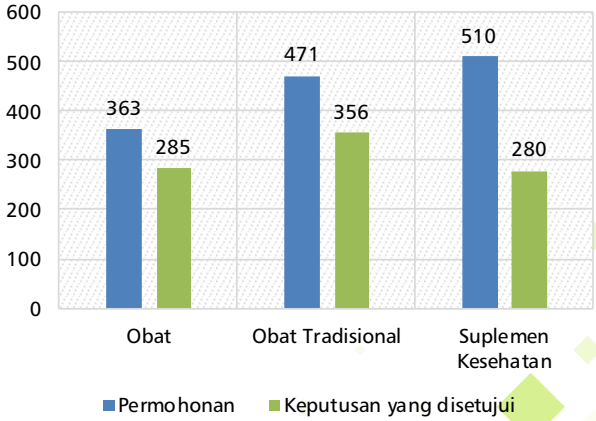

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2018

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, dari 1.344 rancangan iklan, telah disetujui 921 iklan.**

Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

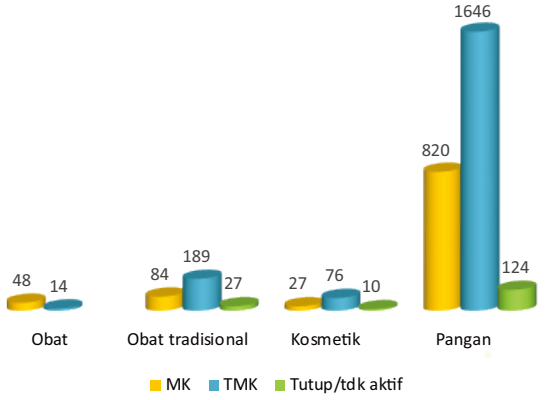

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018 telah diperiksa sebanyak **3.065** sarana dengan **1.925** sarana adalah TMK.

* Sumbangan terbesar **TMK** pada sarana produksi pangan adalah **IRTP** (1213 Sarana)

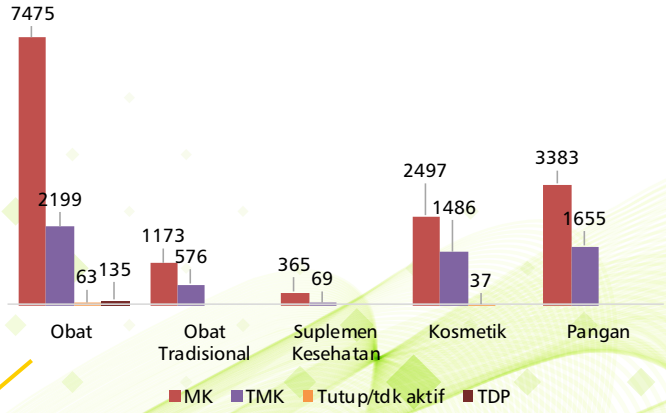

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018 telah diperiksa **21.113** sarana distribusi obat dan makanan dengan **5.985** sarana adalah TMK.

Ket:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan
TDP = Tidak dapat diperiksa

2 Sampling dan Pengujian Laboratorium

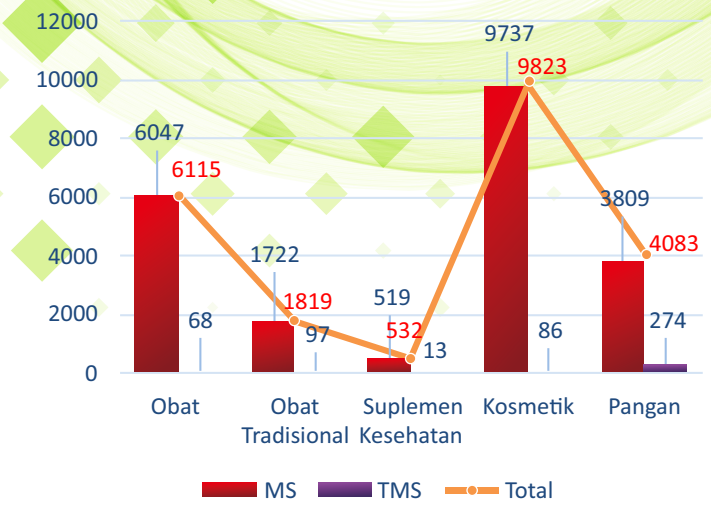

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

Sampai dengan **Triwulan III tahun 2018** telah dilakukan pengujian Obat dan Makanan terhadap **22.372 sampel**, dimana **21.834 (97,60%) sampel MS**.

Ket:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

3 Sertifikasi

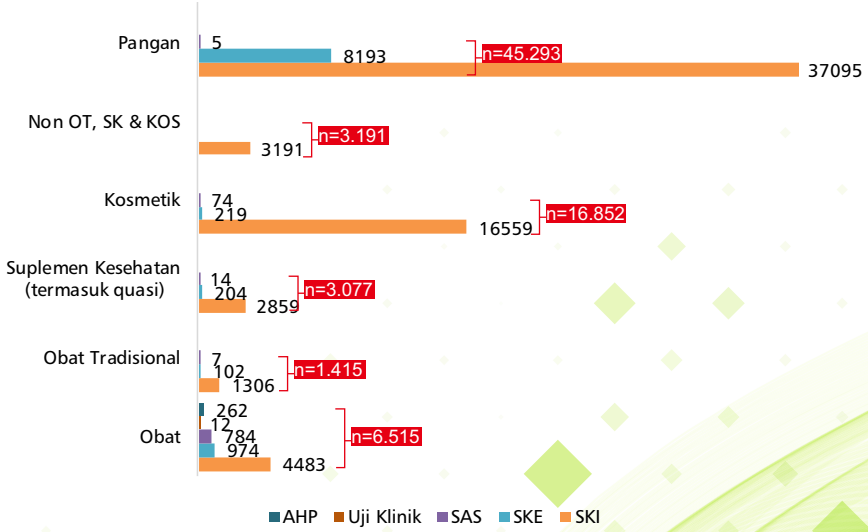

Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

Dalam rangka mendorong ekspor dan Impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI), SAS (*Special Access Scheme*) dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan III tahun 2018** telah diterbitkan **9.692 SKE, 65.493 SKI**, **884 SAS**, **12 Uji Klinik**, dan **262 AHP** Obat dan Makanan.

4 Pengawasan Iklan

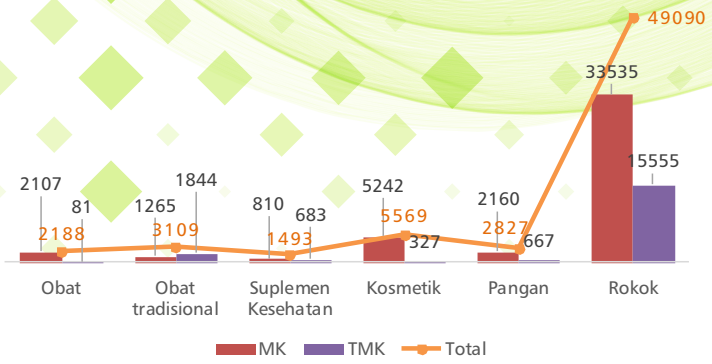

Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, dari 64.276 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 45.119 iklan memenuhi ketentuan.**

5 Pengawasan Label

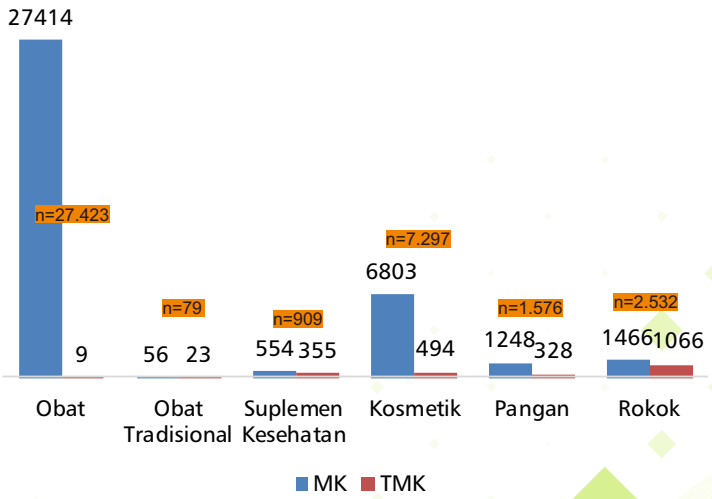

Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2018

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM agar tidak memberikan informasi salah dan menyesatkan masyarakat. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, dari 39.816 label Obat dan Makanan yang diawasi, 37.541 (94,29%) label memenuhi ketentuan.**

6 Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping dan Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sangat luas oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	Persentase
Obat	3.390	1.866	55,04
Obat Tradisional	19	17	89,47
Suplemen Kesehatan	25	22	88,00
Kosmetik	193	131	67,88

Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping

II Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan III pada tahun 2018, PPNS BPOM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 152 perkara. Dari 152 perkara tersebut, 41 perkara masih dalam tahap SPDP; 1 perkara telah dinyatakan SP3; 35 perkara pada tahap 1; 18 perkara dalam tahap P–18/P–19; 13 perkara, berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh JPU (P–21), 36 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2) dan 7 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan.

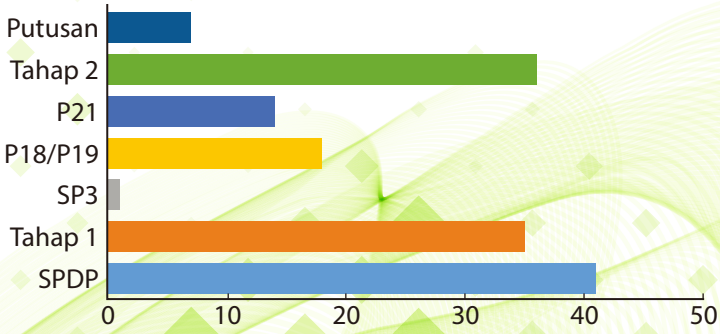

Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan

Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional (OT) tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta, BPOM melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap empat sarana distribusi ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada Rabu (19/9). Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM bergerak menuju lokasi pukul 13.00 WIB dan menemukan 330 item (1.679.268 pieces) OT ilegal dan diduga mengandung bahan kimia obat dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 15,7 miliar rupiah.

PPNS BPOM menemukan 20 item OT ilegal di toko obat ANG di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan temuan ini, petugas kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan gudang berupa rumah tempat tinggal di daerah Cilincing.

Terdapat dua rumah tempat tinggal yang menjadi gudang penyimpanan OT ilegal. Dari dua rumah tersebut ditemukan 127 item OT ilegal dan satu mobil box berisi 21 (dua puluh satu) koli OT ilegal yang siap diedarkan dan rencananya dikirim ke daerah Kudus Jawa Tengah.

Tak berhenti sampai disitu, petugas terus mengembangkan penelusurannya dan berhasil menemulkan 183 item OT ilegal di sebuah rumah tinggal di Jatinegara. Selain itu juga ditemukan satu mobil box yang diduga digunakan untuk mendistribusikan produk ilegal tersebut. Petugas PPNS telah menyita seluruh bukti dari keseluruhan barang bukti yang antara lain berupa jamu obat kuat laki–laki dengan merek Urat Madu, Tanduk Rusa, Spider, Cobra–X, dan Chang Sang; jamu pegel linu dengan merek Wantong Pegal Linu, Tawon Sakti, dan Tawon Liar; jamu asam urat dengan merek Assalam, Kapsul Asam Urat, dan Jaya Asli Anrat; serta jamu pelangsing dengan merek Lasmi dan Arma.

Petugas PPNS BPOM telah memeriksa delapan orang saksi yang berada di lokasi. Kami akan menindaklanjuti temuan ini melalui proses pro–justitia guna mengungkap aktor intelektual.

Kegiatan ilegal ini melanggar Pasal 196 dan 197 Undang–Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah serta Pasal 62 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kepala BPOM menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bidang OT ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pelaku usaha legal.

III Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.

Obat

Telah disusun **13 standar** obat, dimana 12 standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu:

1. Penyusunan regulasi Prosedur Operasional Penerapan Pedoman (POPP) UTD (100%)
2. List Komparator uji Ekivalensi (100%)
3. PerBPOM Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (100%)
4. Perka Obat – Obat Tertentu (Revisi) (100%)
5. Pencabutan Perka persyaratan tambahan izin usaha Industri Farmasi (100%)
6. Penyusunan Standar Obat Baru (Standar Obat Non Kompendial) (80%)
7. Penyusunan Farmakope Indonesia (75%)
8. Pedoman Penilaian Khasiat Keamanan Obat Kanker (70%)
9. Pedoman CDOB (66,7%)
10. Draf Perka Pengawasan Penjualan Obat Online (60%)
11. Perka Tata Laksana Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB Fasilitas Pembuatan Obat Impor (60%)
12. Kajian Produk Biologi (50%)

Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun **10 standar** obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dimana 10 standar tersebut progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu

1. Revisi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM No. 1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Tradisional (80%)
2. Revisi Perka BPOM Nomor 12 tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (90%)
3. Revisi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Promosi dan Periklanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (80%)
4. Penyusunan Pedoman Klaim Obat Tradisional (50%)
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor.HK.00.05.41.1381 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (90%)
6. Rancangan Revisi Perka BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Kesehatan (100%)

7. Pedoman Klaim Obat Suplemen Kesehatan (80%)
8. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (80%)
9. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (90%)
10. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (70%)

Telah disusun **26 kajian** obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yaitu

1. Kajian *Coscinium fenestratum* dan *Evolvulus alsinoides* (100%)
2. Kajian bahan baku sisik dan kulit ikan Toman (*Channa micropeltes*) sebagai kategori produk obat tradisional (100%)
3. Kajian kategori produk dengan bahan baku Bawang Hitam (100%)
4. Kajian Persyaratan Kadar Sineol dalam Produk Minyak Kayu Putih (100%)
5. Kajian Bahan Baku Dilarang dalam Produk "Gurukirpa" (*Painquit Oil dan Diabosoft Cream*) (100%)
6. Kajian Tindak lanjut permohonan Naik Banding Produk *Nutrimax Pasangin* (100%)
7. Kajian Natrium sulfat sebagai Bahan Aktif dalam Produk Obat Tradisional (100%)
8. Kajian sediaan kapsul spirulina Non–Ekstrak sebagai bahan aktif dalam produk obat tradisional (100%)
9. Kajian bentuk sediaan obat tradisional elixir terkait kadar alkohol (100%)
10. Kajian di bidang suplemen kesehatan *N-acetylsystein* (100%)
11. Kajian di bidang suplemen kesehatan Kalsium Laktat (kadar air) (100%)
12. Kajian Kategori Produk Mengandung *Quail Egg Powder* (100%)
13. Kajian Metode Identifikasi *Strain Probiotik* (100%)
14. Kajian Regulasi Batas Maksimum Penggunaan *Potasium Sorbat* (100%)
15. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan *Choline-Stabilised Orthosilicic Acid* sebagai Suplemen Kesehatan (100%)
16. Kajian katagori produk kombinasi *UC-II, Hyaluronic acid, MSM* (100%)
17. Kajian *Strain Probiotik* pada Produk Suplemen Kesehatan (100%)
18. Kajian tentang *Lemongrass Oil* (*Cymbopogon Flexuosus* dan *Cymbopogon Citratus*) sebagai Bahan Antiseptik Dalam Sabun Mandi Kajian tentang *Timiron Liquid Silver* (100%)
19. Kajian tentang *Timiron Liquid Silver* (100%)
20. Kajian tentang *Benzene* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
21. Kajian tentang *Kloroform* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
22. Kajian tentang *Dibutyl phtalate* sebagai Cemaran dalam Kosmetika (100%)
23. Kajian tentang *Climbazole* 1% sebagai *Anti Dandruff* pada Shampoo (100%)
24. Kajian tentang *Ethoxydiglycol* (100%)
25. Kajian tentang *Tageyes* (100%)
26. Kajian tentang *CAS Number* (100%)

Pangan

Telah disusun **18 standar** pangan, dengan progres sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus – PKMK (90%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Kebutuhan Gizi Khusus – PDK (90%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Cara Iradiasi Pangan yang Baik (70%)
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Steril Komersial yang Baik (70%)
5. Rancangan Peraturan BPOM tentang Penggunaan *Cioko, Gypsum, Nigari, Hidrogen Peroksida, Natrium Hipoklorit*, dan Cairan Fermentasi Asam dalam Proses Pengolahan Pangan (70%)
6. Rancangan Peraturan BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (100%)
7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Tambahan Pangan (100%)
8. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (70%)
9. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Informasi Niai Gizi (78%)
10. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 01.0 Produk–Produk Susu dan Analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0 (95%)
11. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (*Edible Ice*, termasuk *Sherbet* dan *Sorbet*) (70%)
12. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 10.0 Telur dan Produk–produk telur (70%)
13. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 11.0 Pemanis, termasuk Madu (70%)
14. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Kategori Pangan 16.0 Pangan Campuran (Komposit), yaitu Pangan yang tidak termasuk dalam Kategori Pangan 01.0 sampai dengan Kategori pangan 15.0 (70%)
15. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan Kemasan Pangan (78%)
16. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan (70%)
17. Pedoman Cara Perhitungan pangan Olahan Tertentu (Klaim, PRG dan Organik) (70%)
18. Pedoman Pemilihan Kemasan Pangan (70%)

IV Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 32 Siaran Pers, dan 16 penjelasan/klarifikasi berita terkait hoax yang dipublikasikan juga melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 18 kali *talkshow* atas permintaan media televisi, 46 kali wawancara Pimpinan BPOM dengan media.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun *official Facebook Fanpage, Twitter, Instagram* dan *YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah followers secara positif.

1 ***Facebook Fanpage official,*** pada 3 bulan kemunculan *fanpage facebook* yang baru dibuat kembali di bulan Mei lalu untuk menggantikan fanpage sebelumnya yang telah *determinate*, terdapat 1.248 *likes*. Pertumbuhan *engagement*–nya memang tidak setinggi *platform-platform* lain. Pertumbuhan *engagement* tertingi terjadi di bulan Agustus, yaitu sebesar 776%. Beberapa materi yang menonjol adalah Penjelasan BPOM terkait Keripik Jamur Tahi Sapi yang Menyebabkan Efek Halusinasi; Penjelasan BPOM tentang Susu Kental Manis; Produk–Produk Susu dan Analognya.

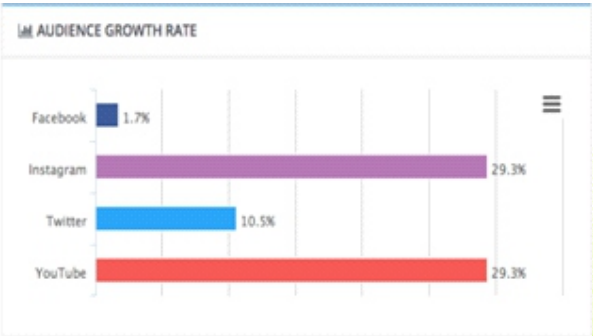

2 Total post ***tweets*** **akun** ***Twitter*** **BPOM** s.d Triwulan III tahun 2018 sebanyak **199** ***tweet*** dan tertinggi dibandingkan *platform* lainnya. *Twitter* mendapat 4.307 *engagement* (5.3%) dengan *post engagement* tertinggi pada materi Penjelasan BPOM tentang Susu Kental Manis di bulan Juli, dan Penjelasan BPOM terkait Keripik Jamur Tahi Sapi yang Menyebabkan Efek Halusinasi di bulan September.

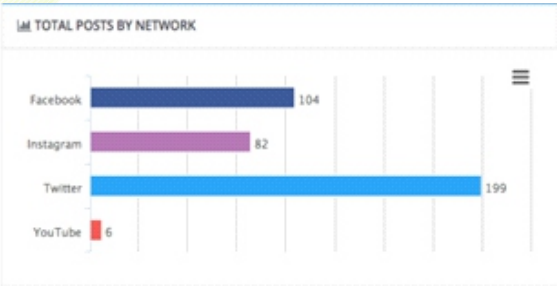

3 ***Instagram*** memiliki pertumbuhan *audience* tertinggi terjadi pada triwulan III tahun 2018 yaitu sebanyak 10.634 *followers* dan memiliki pertumbuhan *engagement* yang sangat signifikan sejak Juli hingga Agustus. Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 21.344 *engagement* pada bulan September. Postingan yang mendapatkan jumlah *like* terbanyak adalah Penjelasan BPOM terkait Kopi Gula Krimer pada bulan September. Sedangkan postingan dengan jumlah komentar terbanyak adalah Bijak Mengkonsumsi Susu Kental Manis di bulan Juli.

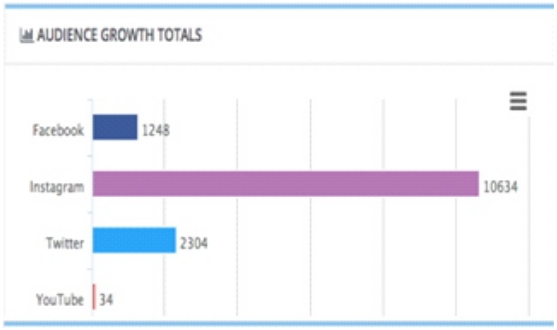

4 **Total pertumbuhan** ***engagement*** terbesar ada di *platform Instagram* dan *Youtube* dibandingkan dengan *platform* lain dimana platform *Youtube* mendapatkan 74 *engagement* (139%), *Instagram* mendapatkan 50.541 *engagement* (47,3%), *Twitter* mendapatkan 4.307 *engagement* (5.3%) serta *Fanpage Facebook* mendapatkan 18.464 *engagement* (–34.4%).

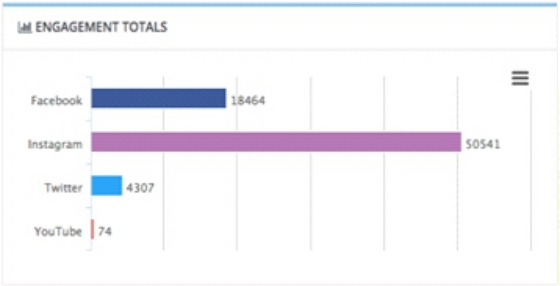

Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, telah dibentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan media komunikasi dua arah antara BPOM dan masyarakat. ULPK merupakan saluran penyampaian saran, pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat kepada BPOM.

Data **layanan informasi dan pengaduan masyarakat** pada triwulan III tahun 2018, menunjukkan BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta melalui *Contact Center* HaloBPOM1500533 **25.292 (97,49%) layanan informasi** dan **651 (2,51%) layanan pengaduan**.

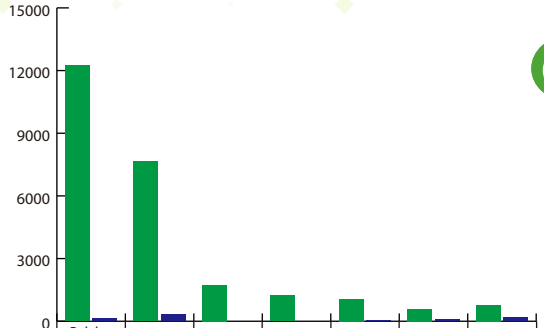

	Pelaku Usaha	Karyawan	Umum	Pelajar/ Mahasiswa	Apoteker	Ibu Rumah Tangga	Profesi Lainnya
Layanan Informasi	12251	7636	1739	1241	1067	590	768
Layanan Pengaduan	98	310			24	67	152

a **Profil profesi** masyarakat yang mengakses **layanan informasi** sebagian besar berasal dari **Pelaku Usaha** sebanyak **12.251 (48,44%) layanan**. Adapun **layanan pengaduan** sebagian besar dari **karyawan** sebanyak **310 (47,62%) pengaduan**.

b **Media komunikasi** yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses **layanan informasi** yaitu melalui **telepon** sebanyak **12.192 (48,21%) layanan** dan **datang langsung** sebanyak **9.806 (38,77%) layanan**. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam **penyampaian pengaduan** yaitu **datang langsung** sebanyak **202 (31,03%) layanan**.

Media Layanan Informasi	Media Layanan Pengaduan
Telepon 12192 Layanan Informasi (48,21%)	**Telepon** 166 Pengaduan (25,49%)
Datang Langsung 9806 Layanan Informasi (38,77%)	**Datang Langsung** 202 Pengaduan (31,03%)
Email 1662 Layanan Informasi (6,57%)	**Email** 184 Pengaduan (28,26%)
SMS 1113 Layanan Informasi (4,40%)	**SMS** 58 Pengaduan (8,91%)
Media Lainnya 516 Layanan Informasi (2,04%)	**Media Lainnya** 41 Pengaduan (6,29%)

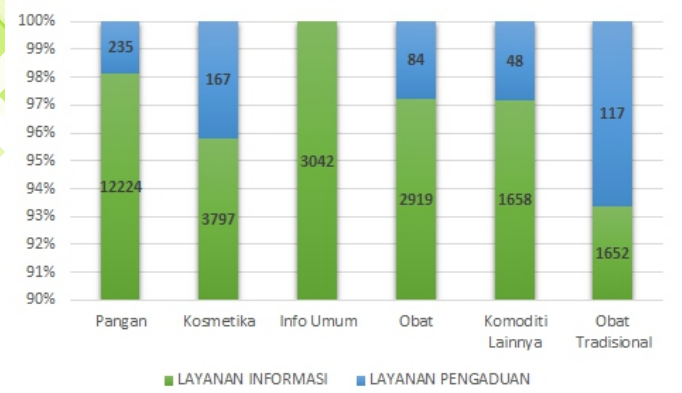

c **Komoditi** yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait **pangan** sebanyak **12.224 (48,33%) layanan informasi** dan **235 (36,10%) layanan pengaduan**.

d **Topik informasi** yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu **informasi terkait proses pendaftaran** sebanyak **10.418 (41,19%) layanan**. Adapun **topik pengaduan yang paling banyak** yaitu pengaduan tentang **inspeksi** sebanyak **327 (50,23%) layanan.**

* Pengaduan terkait produk / sarana yang ilegal dan / atau **TMS** yang perlu tindak lanjut di lapangan

Tahun 2018 BPOM telah melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media juga melakukan KIE secara langsung ke masyarakat, seperti BPOM *'Goes To Campus'*, *Car Free Day* (CFD), Pameran, kegiatan koordinasi lintas sektor dan lain sebagainya.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Triwulan III Tahun 2018 28 Kegiatan

KIE LANGSUNG KE KOMUNITAS MASYARAKAT

- KIE ke Komunitas Wanita di Kepolisian Republik Indonesia bersama Sahabat Ibu Indonesia (12 Juli 2018)
- KIE pada Komunitas Masyarakat di *Area Car Free Day* (12 Agustus 2018)

KIE PADA KUNJUNGAN MAHASISWA

- KIE pada Kunjungan Mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB (13 Juli 2018)
- KIE pada Kunjungan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Gizi Kesehatan UGM (17 Juli 2018)
- KIE pada Kunjungan Mahasiswa Fakultas Farmasi UI (31 Juli 2018)
- KIE pada Kunjungan Mahasiswa Farmasi UNPAD (6 Agustus 2018)

KIE MELALUI MEDIA (AGUST–SEP)

- KIE Melalui TV Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) – Terminal 1 dan 2
- KIE Melalui TV Bandara Kualanamu (Medan)
- KIE Melalui TV Bandara Hussein Sastranegara (Bandung)
- KIE Melalui TV Bandara Sultan Thaha (Jambi)
- KIE Melalui TV Bandara Sultan Kasim (Pekanbaru)
- KIE Melalui TV Bandara Mahmud Badarudin (Palembang)
- KIE Melalui TV Bandara Deputi Amir (Pangkal Pinang)
- KIE Melalui TV Bandara Deputi Amir (Pangkal Pinang)

KIE MELALUI PAMERAN

- Klinik Konsumen Obat dan Makanan di Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI 2018 (3–4 Juli 2018)
- Klinik Konsumen Obat dan Makanan di Hari Hak Untuk Tahu, Pontianak (27–28 September 2018)

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG OBAT DAN MAKANAN BERSAMA LINTAS SEKTOR

- Edukasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara (9 September 2018)
- Edukasi masyarakat di Kabupaten Purbalingga (10 September 2018)
- Edukasi masyarakat di Kabupaten Jember (21 September 2018)
- Edukasi masyarakat di Kabupaten Lumajang (22 September 2018)
- Edukasi masyarakat di Kabupaten Tulungagung (28 September 2018)
- Edukasi masyarakat di Kabupaten Blitar (29 September 2018)

KIE "BPOM GOES TO CAMPUS" DALAM RANGKAIAN JOBFAIR BPOM

- KIE di Kampus Universitas Indonesia (26 September 2018)
- KIE di Kampus Institut Teknologi Bandung (27 September 2018)
- KIE di Kampus Universitas Gadjah Mada (29 September 2018)
- KIE di Kampus Universitas Airlangga (2 Oktober 2018)
- KIE di Kampus Universitas Hasanuddin (4 Oktober 2018)
- KIE di Kampus Universitas Andalas (4 Oktober 2018)

V Penayangan Data dan Informasi Strategis Pada BPOM *Command Center*

***Updating* SIPT** sesuai Prioritas Sampling 2018

Tanda Tangan Elektronik (TTE) Aplikasi e–reg Pangan

Penyempurnaan Website BPOM dengan penambahan Subsite BB/BPOM, fitur infografis, fitur BPOM Bicara dan Banner

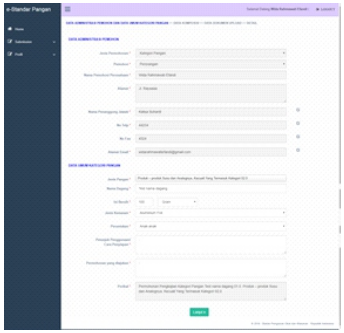

Pendaftaran Jenis Kategori pada **Aplikasi E–Standar Pangan**

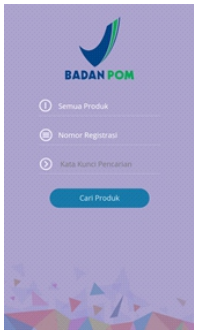

***Redesign* Cebpom Versi Mobile** dan Penambahan Fitur *Recall* Obat pada Versi Web

Aplikasi Penanggulangan Keracunan Berbasis Online (versi mobile)

Dashboard Command Center menayangkan 13 jenis data atau informasi

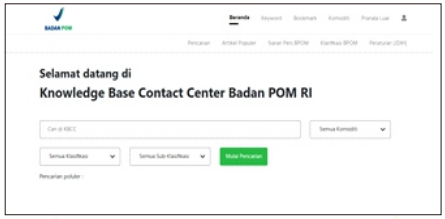

Aplikasi ***Knowledge Based Contact Center***

Aplikasi **SMART BPOM**

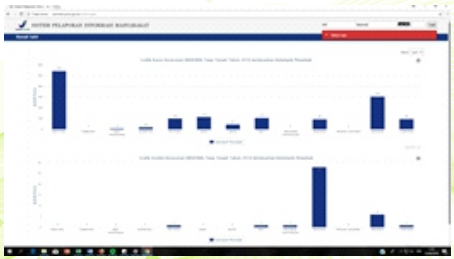

Aplikasi SPIMKer–KLB KP (Pemetaan kasus keracunan Obat dan Makanan berbasis risiko) dapat diakses dari *smartphone*

VI Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Bersama dengan stakeholder lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, BPOM ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. BPOM juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Permenkes Tahun 2018. Secara internal, sampai dengan triwulan III tahun 2018, BPOM telah menyelesaikan 31 Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Rancangan 203 Keputusan Kepala BPOM dan 8 Rancangan MoU. Selain itu, BPOM telah melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dan penyuluhan hukum mengenai peraturan Obat dan Makanan, advokasi hukum terhadap *stakeholder* (pengacara dan LSM) serta penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

4 Judul RUU

1. RUU tentang Perlindungan Konsumen
2. RUU tentang Ketenaganukliran
3. RUU tentang Narkotika
4. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

5 Judul RPP

1. RPP tentang Pelaksanaan urusan dan pemerintah konkuren
2. RPP tentang Jaminan Produk Halal
3. RPP tentang Revisi PP 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
4. RPP tentang Keamanan Pangan
5. RPP tentang Label dan Iklan Pangan

2 Judul Rancangan PERMEN

1. Permenkes tentang Pelimpahan kewenangan pemasukan dan pengawasan obat melalui meknisme jalur khusus SAS
2. Revisi Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman peringatan kesehatan dan informasikesehatan pada kemasan produk tembakau

VII Layanan Bantuan Hukum (Legal Management)

Maraknya tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah tentu saja harus diantisipasi dengan penguatan peran pada bagian legal/hukum di setiap instansi pemerintahan. Satuan kerja yang membidangi urusan hukum ini dituntut untuk meningkatkan peran dan kemampuannya dalam menangani kritik dan koreksi masyarakat melalui pemberian bantuan hukum berupa pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan hukum kepada saksi/ahli, dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Sampai dengan **Triwulan III Tahun 2018**

jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sejumlah 200 layanan

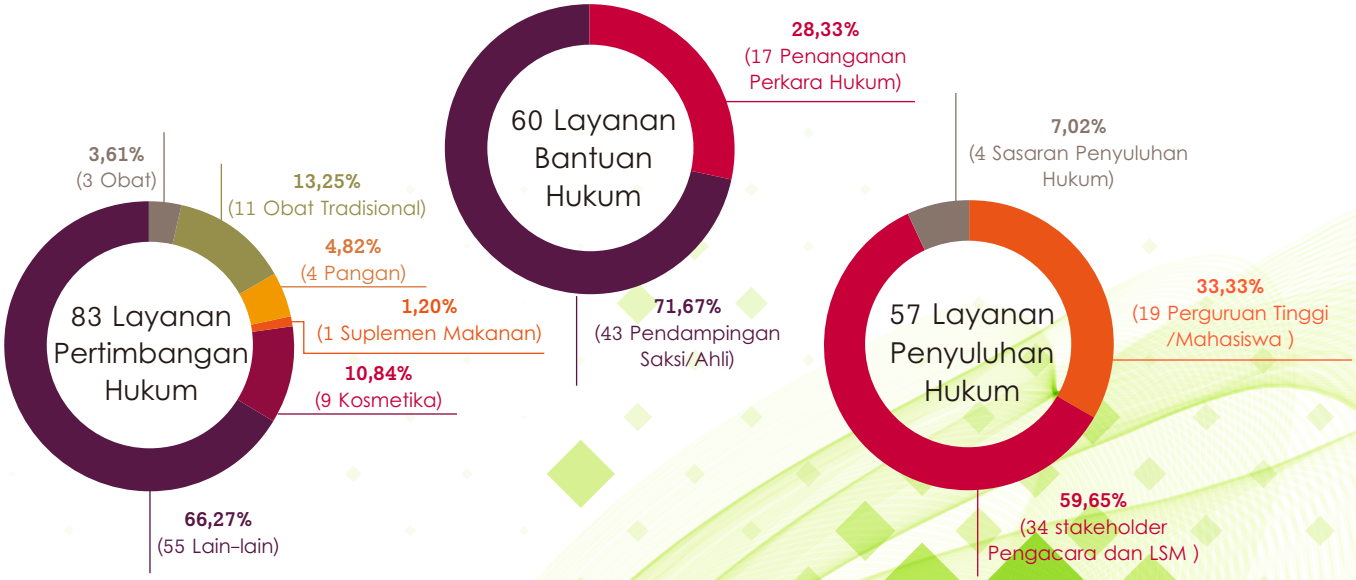

VIII Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke–6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Berikut kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan III 2018 :

a. 5 – 8 Maret 2018 : kunjungan kerja ke India yang bertujuan untuk melakukan benchmarking bagi pengembangan obat tradisional di Indonesia dengan mengikutsertakan pelaku usaha industri farmasi dan obat tradisional Indonesia untuk melakukan secara langsung pertemuan Business to Business dengan kalangan industri terkait di India guna mendukung kerja sama dagang yang menguntungkan kedua negara.

b. 11 – 14 Maret 2018 : Kepala BPOM selaku wakil Ketua Delegasi RI (Delri) menghadiri Pertemuan Sesi ke–61 *Commission on Narcotics Drugs* (CND) untuk mengikuti sesi Debat Umum (*General Debate*) dan *National statement* Indonesia. Di sela–sela pertemuan CND tersebut, BPOM juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan *Executive Director* UNODC, Mr. Yury Fedotov, yang sepakat untuk memperkuat dan kerja sama kedua lembaga melalui pembentukan suatu nota kesepahaman, khususnya dalam kerangka mendukung implementasi Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada bulan Oktober 2017.

c. 17 – 25 April 2018 : Delegasi Komisi IX DPR RI bersama BPOM mengadakan pertemuan antara lain dengan Departemen Kesehatan dan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan di Amerika, *United Nation Development Programme* (UNDP) dan *United Nation Under Secretary General for Department of Economics and Social Affairs* (USG DESA), *Massachusets Institute of Technology* (MIT), *Harvard Kennedy School* (HKS). Pada kunjungan kali ini Kepala BPOM juga menjadi panelis bersama para pejabat tinggi *World Bank*, *United States Food and Drug Administration* (USFDA), Badan Pengawas Obat Chile dan sektor swasta (*Waters Corporation, Global Food Safety Initiative* dan *PRAN-RFL Group*) dimana tujuan

pertemuan ini adalah memperkuat dukungan lembaga keuangan nasional dan internasional serta swasta untuk meningkatkan keamanan pangan melalui kebijakan dan inovasi yang tepat dan pada kesempatan ini BPOM menyampaikan pengalaman dalam menjawab tantangan keamanan pangan melalui pengawasan *pre – market* dan *post - market*.

d. 15 – 18 April 2018 : Kunjungan Kerja ke Jerman bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengetahuan secara langsung terkait peningkatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka perumusan rancangan Undang – Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan dengan cara mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai sistem pengawasan obat dan makanan di Jerman serta regulasi yang ada terkait pengawasan obat dan makanan. Pada kunjungan kerja ke Jerman, instansi yang telah dikunjungi adalah *Hamburg School and Food Science* (HFS) – *the University of Hamburg* di Hamburg, *Federal Office of Consumer Protection and Food Safety* (Kantor Federal Perlindungan Konsumen dan Keamanan Makanan) di Berlin, *Federal Institute for Medicine and Medical Devices* (Institut Nasional untuk Obat – obatan dan Alat Kedokteran) di Bonn.

e. 23 – 27 Juli 2018 : Kegiatan KSS Timor Leste, BPOM menyelenggarakan program bantuan pengembangan kapasitas untuk Badan Inspeksi Aktivitas Pangan dan Sanitasi, Institusi Publik (*Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar*, Institusi Publik / AIFAESA, I.P.) Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Denpasar, Bali. Rangkaian kegiatan dalam program tersebut meliputi diskusi panel mengenai peran otoritas pengawas makanan di masing–masing negara, pelatihan di dalam kelas berupa *sharing knowledge* terkait inspeksi pangan olahan.

f. 27 Agustus 2018 : BPOM menyelenggarakan program KSS dalam bentuk *knowledge sharing* dengan peserta dari Maroko dan Tunisia. Kegiatan ini merupakan dukungan terhadap program *Reverse Linkage* (RL) di bidang vaksin yang dihasilkan dari kesepakatan (MoU) antara Bappenas dan *Islamic Development Bank* (IDB) mengenai program RL pada tahun 2017. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong kemandirian produksi vaksin dan ketersediaan vaksin dan mendorong investasi PT Bio Farma di kedua negara tersebut. Dalam hal ini, BPOM membagi ilmu dan praktik terbaik dalam penjaminan mutu, keamanan dan khasiat dari vaksin.

g. 6 – 10 Agustus 2018 : Kepala BPOM beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mengadakan pertemuan dengan mitra–mitra regulator di RRT yaitu *Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China* (CNCA); *General Administration of Custom of the PRC* (GACC); *State Administration of Traditional Chinese Medicine* (SATCM); serta *Food and Health Bureau*, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Selain itu, Delegasi BPOM juga mengadakan pertemuan dengan beberapa Industri Farmasi di RRT. Tujuan dari pelaksanaan kunjungan kerja ini adalah benchmarking untuk pengembangan obat tradisional yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional; mendorong pasar ekspor produk Indonesia ke RRT; mendorong investasi industri farmasi Tiongkok khususnya produk bioteknologi dan vaksin halal di Indonesia; mendorong pengembangan produk natura untuk pengobatan di Indonesia; serta penanganan hambatan ekspor kedua negara. Sebagai tindak lanjut, dalam rangka pengembangan obat tradisional BPOM dan SATCM sepakat untuk menyusun MoU untuk meningkatkan kapasitas regulasi dan mendorong daya saing obat tradisional di Indonesia.

h. 21 Agustus 2018 : Dalam rangka persiapan penyelenggaraan **"Pertemuan Pertama Para Kepala Badan Pengawas Obat Negara–Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)"** pada tanggal 21–22 November 2018 di Jakarta dan akan mengangkat tema **"*Strengthening collaboration amongst the OIC NMRAs towards self-reliance of Medicines and Vaccines*"**, BPOM bersama Kementerian Luar Negeri telah melakukan "*Briefing*" kepada Para Duta Besar negara anggota OKI yang ada di indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh Duta Besar Maroko, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Qatar, Iran, Pakistan, dan Malaysia. Briefing kepada Duta Besar negara anggota OKI di Indonesia ini bertujuan untuk menginformasikan rencana penyelenggaraan pertemuan para Kepala Badan Pengawas Obat tersebut. Secara umum, Para Duta Besar dan perwakilan negara–negara OKI di Jakarta telah menyambut baik dan mendukung rencana pertemuan dan akan membantu menyampaikan informasi terkait persiapan persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Pertama Kepala Badan Pengawas Obat Negara–Negara Anggota OKI.

IX Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2018, BPOM mendapat anggaran sebesar **Rp2.173.728.393.000,–** untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM.

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2018 sebesar **Rp895.747.470.054,– (41,21%)** yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp308.615.886.024,– dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp587.131.584.030,–

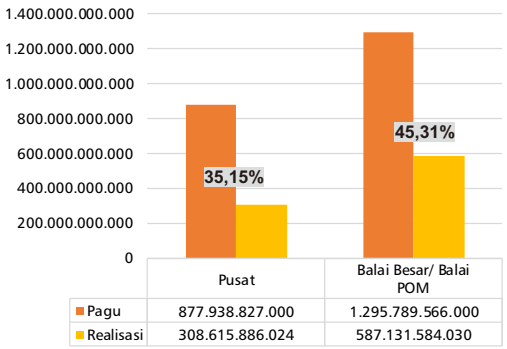

Gambar 11. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan POM Pusat dan Balai s.d. Triwulan III Tahun 2018

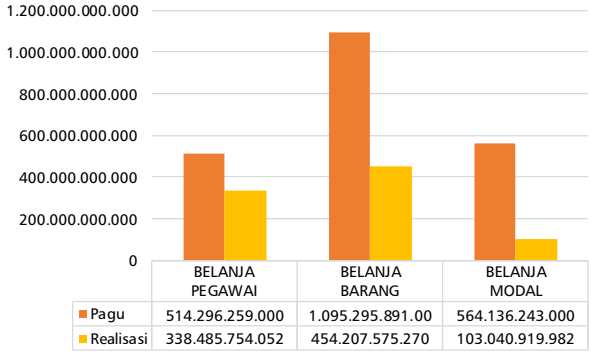

Gambar 12. Proporsi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja s.d. Triwulan III Tahun 2018

X Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2017. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifkasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III tahun 2018 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan 2015–2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN s.d. TRIWULAN III TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**	**Capaian pelaksanaan reforamsi birokrasi di BPOM**	**78**		
		Opini laporan keuangan BPOM dari BPK	**WTP**	**WTP**	**100**
		Nilai SAKIP BPOM dari Menpan	**78**		
1.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi serta Program Penataan Tata Laksana terhadap total rekomendasi	100	-	-
		Persentase permintaan advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	66,67	66,67
		Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu	100	92,27	92,27
1.2	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM	baseline	-	-
		Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan yang diselesaikan	78	56,87	72,91
1.3	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Persentase kerja sama di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara efektif	70	68,13	97,33
		Jumlah kerjasama dan dukungan bantuan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan	3	50	16,67
1.4	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja	70	-	-
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	85,39	113,85

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Persentase SDM Badan POM yang memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	84	82,93	98,72
1.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	72	83,05	115,34
1.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Presentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	50	53,33	106,66
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100	13,04	13,04
		Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	100	50	50,00
1.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Presentase Laporan keuangan BPOM yang disusun untuk menjamin kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan bebas dari kesalahan material	100	100	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	80	83,5	104,38
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	76	0	0,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81,32	100,40
1.9	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80	89,55	111,94
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	80	78,8	98,50
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	76	0	0,00
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 dengan perbaikan	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM**	**Persentase satker yang mampu mengelolan BMN dengan baik**	**100**	**37,21**	37,21
2.1	Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan Pengelolaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja sesuai Standar	88	40	45,45
		Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik	100	102,38	102,38
3	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**Persentase obat yang memenuhi syarat**	**93,5**	**98,89**	105,76
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	**83**	**94,67**	114,06
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	**92**	**99,12**	107,74
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	**82**	**97,56**	118,98
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	**89,6**	**93,29**	104,12
		Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	**13**	**9**	69,23
		Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat CPOTB	**95**	**97**	102,11
		Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	**230**	**226**	98,26
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	**11**	**10**	90,91
		Indeks kesadaran masyarakat	**-**	**-**	-
		Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	**17**	**16**	94,12

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	318	229	72,01
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	84105	56054	66,65
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	63	9,56	15,17
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	25	20,52	82,08
		Jumlah layanan publik BB/BPOM	43991	42410	96,41
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	881	761	86,38
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93	66,06	71,03
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	297	229	77,10
3.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	baseline	47,06	47,00
3.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75	32,5	43,33
3.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60	46,53	77,55
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan	60	-	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	55	50,52	91,85
		Persentase laporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	82	88,64	108,10

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
3.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan tepat waktu	92	90,9	98,80
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko Tinggi dan Teknologi Baru	90	80	88,89
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan Pangan risiko Tinggi dan Teknologi Baru	60	0	0,00
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	11	10	90,91
3.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	60	64,73	107,88
		Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetika	60	53,59	89,32
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	60	-	-
		Persentase laporan efek samping kosmetika yang ditindaklanjuti tepat waktu	65	65,98	101,51
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu	86	90,09	104,76
3.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu	75	84,04	112,05
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	85	55,56	65,36

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
		Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	70	86,67	123,81
		Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	75	75,76	101,01
3.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu, label, iklan, obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	50	85,31	170,62
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	55,04	78,63
		Persentase permohonan ekspor impor obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	98	99,96	102,00
		Persentase label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	50	67,85	135,70
3.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase keputusan hasil pengawasan pangan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan tepat waktu	92	67,57	73,44
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan risiko rendah dan menengah yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	80	40,83	51,04
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan pangan risiko rendah dan sedang	60	0	0,00
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	39,92	49,90

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
3.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Presentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80	57,73	72,16
		Presentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	50	50	100,00
		Persentase balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan	80	66,67	83,33
3.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	84,62	99,56
3.12	Registrasi Obat	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	65	61,86	95,17
		Persentase Keputusan Evaluasi Pengembangan Obat yang diterbitkan tepat waktu	80	79,65	99,56
3.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, yang diselesaikan tepat waktu	70	74,84	106,91
		Persentase Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu.	65	64,44	99,14
		Persentase keputusan Registrasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	83,63	101,99
3.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dimanfaatkan	80	-	-
		Persentase permohonan pengkajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	80,77	107,69

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
3.15	Standardisasi Pangan Olahan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	-	-
		Persentase penyelesaian permohonan pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	99,26	132,35
3.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang dimanfaatkan	70	76,54	109,34
3.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	80	100	113,00
		Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	95	30	32,00
		Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	70	79,91	118,68
		Persentase Propinsi yang menerapkan program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70	Progress 48%	48,00
		Persentase Kabupaten / Kota yang menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPPIRT	28	Progres 20,5%	25,50
		Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70	89,5	24,83
		Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya	65	49,41	76,02
		Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	80	60	70,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	=5/4*100
3.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP) yang ditetapkan	80	0	0,00
		Persentase kemampuan lingkup pengujian terhadap standar/peraturan yang ditetapkan	57	25,3	44,39
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi dan dipelihara sesuai standar	69	89,36	129,51
		Persentase sampel produk biologi yang diuji sesuai Service Level Agreement (SLA)	85	72,6	85,41
		Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	85,4	85,40
3.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	60	10	16,67
3.20	Riset dan kajian di Bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian yang dimanfaatkan	88	Progres 61,13%	61,13

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2018
SUMBER: APLIKASI SMART DJA

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
1		**432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**398.836.033.000**	**158.299.475.745**	39,69%
	3157	**BIRO HUKMAS**	10.041.719.000	6.520.939.842	64,94%
	4110	**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**	10.451.383.000	2.278.691.902	21,80%
	4111	**BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN**	26.783.294.000	2.145.596.369	8,01%
	3158	**BIRO KSLN**	8.225.900.000	3.851.395.305	46,82%
	3159	**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	38.478.810.000	17.573.381.709	45,67%
		BIRO UMUM DAN SDM	304.854.927.000	125.929.470.618	41,31%
	3160	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	104.374.110.000	98.789.429.570	94,65%
	3163	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	786.507.000	665.526.490	84,62%
	3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	114.334.493.000	10.168.923.344	8,89%
	4112	Pengelolaan SDM BPOM	85.359.817.000	16.305.591.214	19,10%
2		**445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**	**64.102.925.000**	**23.131.826.848**	36,09%
	3169	DITWAS DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	3.098.837.000	2.793.649.005	90,15%
	4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.678.663.000	2.443.506.807	25,25%
	3170	DITWAS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	4.090.756.000	3.084.853.522	75,41%
	4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.838.738.000	2.688.348.165	30,42%
	3172	DITWAS PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	2.923.296.000	2.809.330.448	96,10%

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
	4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.074.704.000	1.362.504.857	15,01%
	3174	DITLAI OBAT DAN PRODUK BIOLOGI	3.239.620.000	2.961.538.025	91,42%
	4127	DIT. REGISTRASI OBAT	8.442.470.000	2.451.052.612	29,03%
	3178	DIT. STANDARDISASI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	1.790.039.000	1.533.301.973	85,66%
	4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKT IF	12.925.802.000	1.003.741.434	7,77%
3		**445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**	**45.717.980.000**	**17.546.361.457**	38,38%
	3166	DIT. INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	5.439.525.000	5.167.151.870	94,99%
	4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	11.063.551.000	2.489.166.805	22,50%
	4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	10.173.432.000	2.315.562.592	22,76%
	3176	DIT. STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	1.713.904.000	1.521.494.541	88,77%
	4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.567.899.000	688.739.084	15,08%
	3168	DIT. OBAT ASLI INDONESIA	158.688.000	158.468.000	99,86%
	3175	DIT. PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN KOSMETIK	4.081.483.000	3.495.434.187	85,64%
	4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	8.519.498.000	1.710.344.378	20,08%
4		**445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**	**86.414.310.000**	**31.871.196.274**	36,88%
	3167	DIT. INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN	4.636.509.000	4.372.604.032	94,31%
	4120	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.815.243.000	2.442.817.301	35,84%

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
	3171	DITWAS. PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA	2.120.270.000	1.662.432.488	78,41%
	4124	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAM RISIKO RENDAH DAN SEDANG	12.271.182.000	1.323.221.989	10,78%
	3173	DIT. PENILAIAN MAKANAN	4.129.658.000	3.933.358.619	95,25%
	4126	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	5.499.342.000	1.100.207.713	20,01%
	3177	DIT. STANDARDISASI PRODUK PANGAN	3.192.833.000	3.086.692.467	96,68%
	4130	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	7.805.243.000	1.092.801.140	14,00%
	3179	DIT. SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN	9.717.459.000	8.775.957.753	90,31%
	4132	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	30.226.571.000	4.081.102.772	13,50%
5		**632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**	**44.302.975.000**	**11.640.362.795**	26,27%
	3181	INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	8.292.876.000	7.633.840.259	92,05%
	4117	DIT. PENGAMANAN	5.355.340.000	816.815.600	15,25%
	4118	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.105.698.000	509.877.100	8,35%
	4134	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	24.549.061.000	2.679.829.836	10,92%
6		**433005 -INSPEKTORAT**	**21.384.457.000**	**10.306.745.097**	48,20%
	3161	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTANBILITAS APARATUR BADAN POM	7.152.902.000	6.942.482.714	97,06%
	4115	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR I	8.101.668.000	1.605.784.769	19,82%
	4116	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR II	6.129.887.000	1.758.477.614	28,69%
7		**632420 - PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**	**115.613.266.000**	**30.335.368.817**	26,24%

NO	SATUAN KERJA		PAGU	REALISASI	%
	3180	PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIUM, PENGUJIAN DAN PENILAIAN KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN SERTA PEMBINAAN LABORATORIUM POM	53.192.156.000	25.763.599.128	48,43%
	4133	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	62.421.110.000	4.571.769.689	7,32%
8		**632441 - PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN**	**25.421.674.000**	**6.152.250.652**	24,20%
	3182	RISET KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN	4.765.855.000	4.578.443.851	96,07%
	4135	RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	20.655.819.000	1.573.806.801	7,62%
9		**632458 - PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**	**61.837.505.000**	**17.903.876.737**	28,95%
	3162	PELAYANAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN, INFORMASI KERACUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26.549.530.000	14.757.927.769	55,59%
	4114	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	35.287.975.000	3.145.948.968	8,92%
10		**672828 - PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**	**14.307.702.000**	1.428.421.602	9,98%
TOTAL SATKER PUSAT			**877.938.827.000**	**308.615.886.024**	**35,15%**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	49.278.909.000	22.108.014.750	44,86%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	62.106.653.000	34.401.850.846	55,39%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	55.888.252.000	33.017.838.025	59,08%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	41.579.495.000	26.257.973.913	63,15%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	61.356.765.000	29.325.570.855	47,80%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	40.090.674.000	19.650.720.616	49,02%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	52.874.657.000	21.278.023.931	40,24%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	51.150.246.000	23.240.935.119	45,44%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	49.078.911.000	24.733.498.214	50,40%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	29.791.912.000	11.729.080.707	39,37%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	31.030.874.000	16.602.953.890	53,50%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	39.467.108.000	24.626.777.348	62,40%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	38.475.754.000	14.178.368.663	36,85%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	36.797.141.000	11.414.628.709	31,02%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	50.298.316.000	19.915.652.846	39,60%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	50.750.073.000	15.204.767.644	29,96%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	42.501.451.000	20.581.297.509	48,42%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	28.675.177.000	15.872.798.826	55,35%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	57.380.795.000	27.185.459.141	47,38%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	32.619.368.000	15.843.179.064	48,57%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	27.337.003.000	10.760.288.679	39,36%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	50.411.869.000	18.577.962.078	36,85%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	36.101.836.000	14.190.738.266	39,31%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	41.712.157.000	19.290.608.238	46,25%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	34.381.052.000	15.277.790.619	44,44%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	28.242.883.000	14.018.986.465	49,64%
27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	37.912.287.000	17.291.509.653	45,61%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.065.105.000	10.285.066.119	39,46%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	24.798.299.000	8.968.155.964	36,16%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	24.646.879.000	11.417.542.753	46,32%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	27.243.578.000	8.905.130.054	32,69%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	9.571.461.000	3.963.982.102	41,41%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26.172.626.000	7.014.432.424	26,80%
	TOTAL SATKER DAERAH	**1.295.789.566.000**	**587.131.584.030**	**45,31%**
	TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH	**2.173.728.393.000**	**895.747.470.054**	**41,21%**

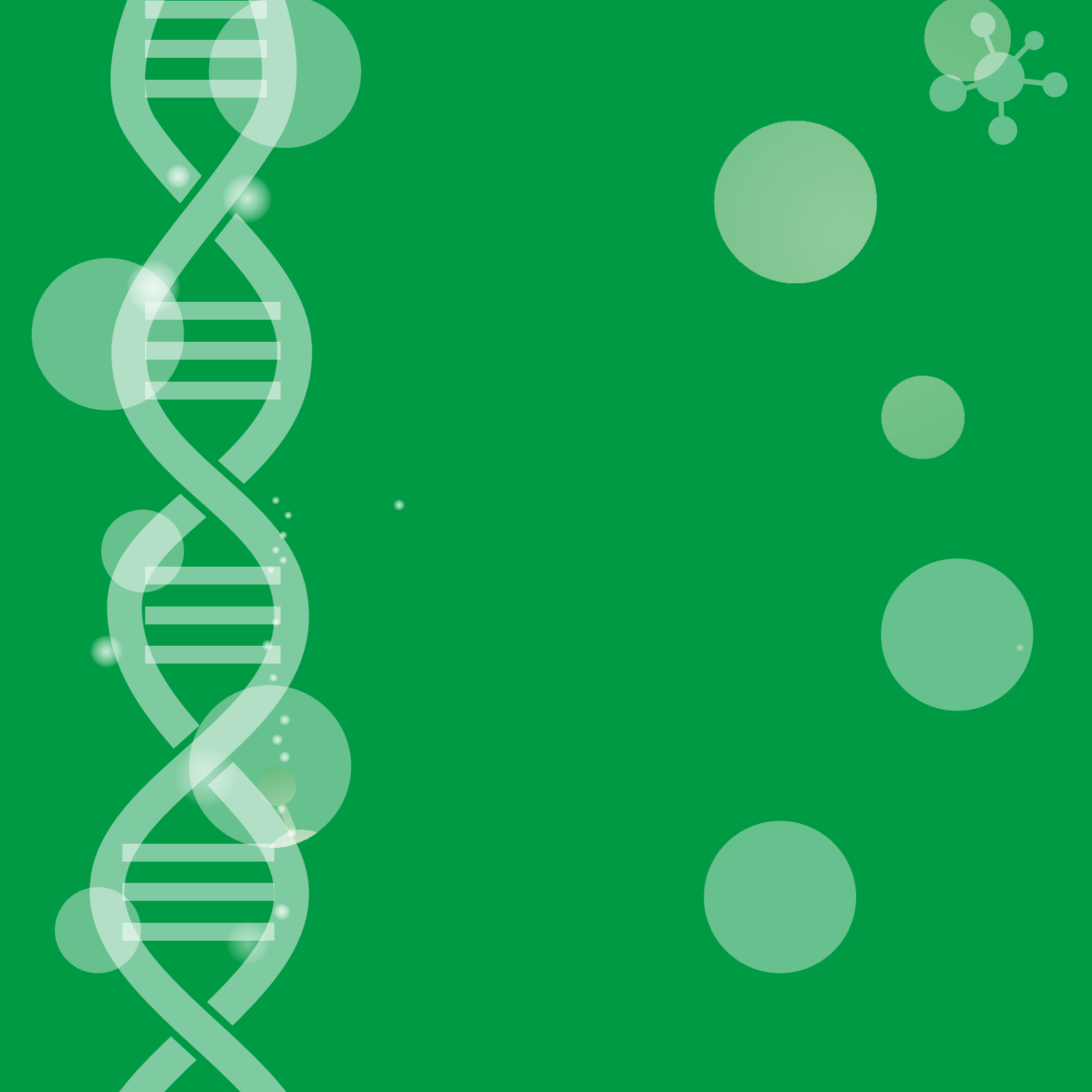

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2018

1500533
HALOBPOM

Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI

BADAN POM RI

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2018